

Abraham Accords: Normalisasi Hubungan dengan Israel



Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation and Constructive Diplomatic, and Friendly Relations adalah perjanjian untuk menormalisasi kerja sama diplomatik dan kerja sama di sektor lainnya antara Israel dengan negara-negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan. Penandatanganan perjanjian antara Israel dan Uni Emirat Arab yaitu tanggal 13 Agustus 2020, dengan Bahrain 11 September, dan Sudan 23 Oktober. UEA, Bahrain, dan Sudan menjadi negara ketiga, keempat, dan kelima yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah Mesir tahun 1979 dan Yordania 1994. Perjanjian ini memunculkan kecenderungan pragmatisme di sebagian kalangan Arab dalam menyikapi isu konflik Palestina-Israel. Kecenderungan ini muncul tidak terlepas dari pengaruh Presiden Donald Trump yang pro-Israel.

Pada 23 Oktober, para pemimpin AS, Israel, dan Sudan mengumumkan pernyataan bersama mengenai tercapainya kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Sudan. Kesepakatan ini diklaim perkembangan paling bersejarah bagi Sudan dalam memajukan demokrasi dan mendukung perdamaian di Timur Tengah. Sebagai imbalannya, AS mengeluarkan Sudan dari negara yang mensponsori terorisme.

Menurut pemerintahan Trump, ada lima atau enam negara lain yang juga siap untuk bergerak maju dan menandatangani perjanjian yang menormalkan hubungan mereka dengan Israel, yang pasti AS tidak memasukan Qatar yang telah mengatakan tidak akan menandatangani perjanjian semacam itu, dan juga Arab Saudi. Penandatanganan perjanjian semacam ini menciptakan perpecahan di dalam keluarga yang berkuasa, yaitu antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang mendukung perjanjian tersebut dan ayahnya Raja Salman yang menentang. Bagaimanapun, pemerintah Saudi telah menyepakati sebuah perjanjian, antara lain membuka wilayah udaranya untuk penerbangan Israel.

Faktor utama negara-negara Arab menormalisasi hubungannya dengan Israel antara lain: Pertama, adanya kekhawatiran tersendiri ketika Joe Biden yang terpilih, mungkin akan menerapkan kebijakan yang jauh lebih ketat daripada pemerintahan Trump mengenai hak asasi manusia dan transfer senjata regional. Kemungkinan yang lain yaitu mengambil pendekatan yang lebih lembut terhadap Iran. Kedua, selama beberapa tahun terakhir, kekhawatiran juga meningkat di seluruh Teluk terkait keamanan kawasan, terutama sejak Trump dan pendahulunya, Barack Obama, berusaha menarik kehadiran militer AS di sana. Ketiga, perpecahan internal Palestina antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat mengakibatkan perbedaan orientasi kebijakan di antara negara-negara Teluk. Meskipun mereka semua berkomitmen pada perjuangan Palestina, sering kali diwujudkan dalam bantuan finansial. Keempat, Kesepakatan tersebut menggarisbawahi sejauh mana beberapa negara Arab bersedia untuk melawan peningkatan agresi dan pengaruh regional Teheran. Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri UEA, mengatakan bahwa tindakan regional agresif Iran memaksa Emirat untuk mempertimbangkan hubungan dengan Israel.

Negara-negara Arab lain akan terus mencari solusi politik untuk konflik tersebut sebelum mengikuti jejak UEA, Bahrain, dan Sudan. Misalnya, Arab Saudi, masih mendukung posisi Palestina pada isu-isu penting dan mengharapkan adanya kepemimpinan untuk menunjukkan keseriusannya di meja perundingan. Pada saat yang sama, Kuwait, Qatar, dan negara-negara Teluk lainnya dengan keras menolak segala macam aneksasi Israel atas wilayah di Tepi Barat yang membuat percikan

api di kubu Palestina dan hukum internasional. Demikian pula, kementerian luar negeri di Riyadh dan Abu Dhabi yang terus menekankan dukungan untuk pembentukan negara Palestina bersama Israel, dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Kerja sama UEA, Bahrain, Sudan dengan Israel yaitu dalam bidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, kelautan, dan lain sebagainya. UEA menggagap bahwa penandatanganan Abraham Accords merupakan terobosan diplomatik yang membentuk alur dialog kepada Israel untuk mengakhiri proses menuju perdamaian Israel-Palestina. Dalam isu Iran dan keamanan kawasan, UEA terus mendorong AS untuk memasok jet tempur F-35, karena satu-satunya penerima saat ini di kawasan adalah Israel. Apabila AS memasok jet tempur tersebut, maka keunggulan militer Israel akan tersaingi. Ini juga akan mempercepat perlombaan senjata yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Dalam upaya memfasilitasi dan memperkuat perjanjian perdamaian Israel dengan Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994, AS meningkatkan bantuan militer dan penjualan ke kedua negara Arab tersebut. Yordania, misalnya, menerima jet tempur F-16. Kondisi dan isu sekarang pun terbilang sama, yaitu demi memperkuat perjanjian Abraham Accords dan demi keamanan kawasan.

Bahrain bereaksi positif terhadap perjanjian Israel-UEA dan menjadi negara Arab pertama yang memberi sinyal dukungan. Bahrain menganggap bahwa perjanjian ini akan memajukan toleransi, koeksistensi, dan keterbukaan budaya dan agama serta memajukan upaya-upaya penyelesaian masalah Palestina yang sejalan dengan solusi dua negara. Begitupun Sudan juga melakukan normalisasi dengan Israel dengan fokus awal di sektor pertanian. Dan yang lebih terpenting, perjanjian ini sebagai jalan untuk menghapuskan negara ini dari daftar negara pendukung terorisme. Terkait isu Palestina, posisi Sudan sejalan dengan posisi Liga Arab dan OKI.

Tanggapan Palestina dan Indonesia terhadap Normalisasi dengan Israel

Perdamaian tidak tiba-tiba datang seperti sihir, perdamaian harus melibatkan kedua sisi. Untuk meyakinkan Palestina atas Bahrain, UEA, dan Sudan sebagai perantara yang dapat dipercaya. Kemudian Israel juga harus mendekati

rakyat Palestina secara langsung dan menunjukkan bahwa kesepakatan ini dapat berdampak positif bagi mereka. Pertama, Israel tidak hanya untuk menanggukkan, tetapi juga penghentian permanen pembangunan dan perluasan pemukiman dan infrastruktur di luar blok pemukiman ke jantung Tepi Barat. Tatanan regional geopolitik baru memberi Israel keuntungan strategis, karena normalisasi dengan mitra regional tidak lagi bergantung pada lampu hijau dari Palestina, dan saat itu membutuhkan kepemimpinan yang berani dari Israel.

Pihak UEA dan Bahrain telah berusaha meyakinkan orang-orang Palestina bahwa negaranya tidak akan meninggalkan Palestina atau upaya mereka untuk menjadi negara bagian di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, pihak Palestina telah mengancam kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap tujuan suci mereka.

Perdamaian Palestina bergantung kepada Presiden terpilih AS. Selama bertahun-tahun, AS konsisten dalam proses perdamaian melalui berbagai perubahan administrasi. Namun, pemerintahan Trump telah mengambil sejumlah keputusan yang menunjukkan perubahan signifikan dari kebijakan tradisional AS pasca-1967, mulai dari status Yerusalem hingga aneksasi yang merajalela. Setelah itu, hubungan AS dan Palestina terputus dan juga menutup misi PLO serta memblokir segala bantuan dari AS.

Posisi Indonesia dalam masalah ini yaitu mengikuti amanah konstitusi “maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan”. Namun, Indonesia menemui kendala semenjak normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. Apabila Israel sudah diakui sebagai sebuah negara, itu akan berdampak kepada perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Di samping itu juga, Indonesia mempunyai hubungan baik dengan UEA dan Bahrain, apabila berlawanan dengan itu, maka hubungan mereka akan renggang. Perwakilan Indonesia di PBB selalu membawa isu Israel-Palestina sebagai isu hangat yang patut diperbincangkan, berbeda dengan negara-negara lain yang mulai mengesampingkan isu Palestina.

Referensi

Yoel Guzansky, Zachary A. Marshall. "The Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implications". *Israel Journal of Foreign Affairs*. DOI: 10.1080/23739770.2020.1831861.

Jeffrey Goldberg. "Iran and the Palestinians Lose Out in the Abraham Accords From authoritarian leaders to White House aides to the Palestinians, tallying the winners and losers". Dalam <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/09/winners-losers/616364/>, diakses pada 17 November 2020.

Dian Septiari. "Abraham Accords won't change Indonesia's position: Foreign Ministry". Dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/18/abraham-accords-wont-change-indonesias-position-foreign-ministry.html>, diakses pada 18 November 2020.

Massimiliano Fiore. "The Abraham Accords and the Palestinian Issue". Dalam <https://www.e-ir.info/2020/11/01/the-abraham-accords-and-the-palestinian-issue/>, diakses pada 18 November 2020.

Joseph V. Micallef. "These Are the Winners and Losers from the Abraham Accords". Dalam <https://www.military.com/daily-news/opinions/2020/10/07/these-are-winners-and-losers-abraham-accords.html>, diakses pada 17 November 2020.

<https://www.state.gov/the-abraham-accords/>